

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Abdul, Wahab Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amalia, Citra Rizki & Pratolo, Suryo. 2013. Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah . *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 14, No. 1, 1-13.
- Amalia, Yurika. 2017. Analisis Pelaksanaan Anggaran pilkada yang Berasal dari Hibah (Studi Kasus pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat). [Tesis]. Padang. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas. 146 hal.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. Politik Anggaran Dalam pelaksanaan pilkada Serentak, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, 51-64.
- Darfina, & Basri, Hasan, & Faisal. 2015. Pengaruh Politik Anggaran dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Proses Penetapan Pendapatan dan Belanja Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4, No. 3, 80-89.
- Dunn, Allourna & Suharyono & Wilopo. 2015. Analisis Strategi Negosiasi Dalam Memasuki Pasar Luar Negeri. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 23 No. 2, 1-9.
- Fakhry, Syarifuddin, & Said, Darwis. 2014. Budget Process Pemerintahan Daerah: Menelisik Nilai Kemandirian Atas Perilaku Aktor Anggaran. *Jurnal Analisis*, Vol. 3, No. 2, 189-194.
- FITRA. 2012. Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Daerah Efisien Dan Demokratis.
- Flink, Carla M. & Molina, Angel Luis Jr. 2016. *Politics or Professionalism? Budgeting for Bilingual Education*. The University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX, USA, 1-24.
- Gayatri. 2015. Konflik Kekuasaan Dalam Anggaran Pemilukada Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 12, No. 1, 111-142.
- Hasan, Helmi Ach, & Haryadi, Bambang, & Rinawati, Yuni. 2015. Jalan Panjang Menuju Pengesahan APBD : Berdasarkan Sudut Padang Agency Theory. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No.1, 27-51.

- Hasan, M.I. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hikmah, Nurhidayati, & Busaini, & Sri Pancawati. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran Dan Transparansi Publik Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan KUA-PPAS Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3, No 1, 103–115.
- Ikhsan, Mohammad Fadhli & Sekar Arum Mandalia. 2015. Komunikasi Public Relations Dalam Implementasi Teknil Lobi Dan Negosiasi Pada Kegiatan Eksternal Telkom Foundation. *e-Proceeding of Management* : Vol.2, No.1, 934-951.
- Islamy, Irfan. 2014. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jaelani, Aan. 2014. *Keuangan Publik Islam: Refleksi APBN dan Politik Anggaran di Indonesia*, Cirebon: MPRA.
- Mardismo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Neuman, W. Laurens. 2013 *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Edina T & Sofia, Penerjemah.). Jakarta: PT. Indeks.
- Ngusmanto, & Sujendra, Bima. 2015 Perilaku Tim dan Badan Anggaran Dalam Formulasi Kebijakan Umum Anggaran Kota Pontianak. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 1, 22-30.
- Pratiwi, Ratih Nur. 2010. Politisasi Anggaran Sektor Publik. *Jurnal Interaktif*, Vol. 1, No. 2, 1-9.
- Suartini, Ni Kadek Ayu, & Ariyanto, Dodik, & Maria, M, & Sari, Ratna. 2016. Determinan Perilaku *Opportunistic* Penetapan Anggaran Calon *Incumbent* Terkait pilkada Serentak Tahun 2015. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 8, 2639-2664.
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zetra, Aidinil. 2016. *Modul Pembelajaran Keuangan Pemilu*, Padang: Fisip Unand.

Artikel Online

- Diusulkan pilkada Dibiayai APBN.(2013, 18 Februari). *Majalah Berita Wacana Publik, Jakarta*. <https://wacanapublikonline.wordpress.com/>
- Gubernur Jamin Anggaran pilkada Serentak Aman. (2015, 22 Januari). *Antara, Padang*. www.antarasumbar.com/
- www.kpu.go.id

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

